

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia-Perspektif Hukum dan Etika*, UII press.
- Apeldoorn, Van L.J., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Buku Panduan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Echols, M John & Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris – Indonesia*, PT Gramedia Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frequently Asked Question (FAQ), *Pelaksanaan Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) Oleh Profesi*, PPATK.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Indriati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan*, 2007, kanisius, Yogyakarta.
- _____, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, 1998, kanisius.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-Prespektif hukum progresif*, Thafa Media, Yogyakarta

Mochtar, Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya kembali Pasca-Amademen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok.

Modul PPATK Modul PPATK E-Learning 1, bagian 4 : *Pengaturan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*, PPATK, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi refisi, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, KaryaMedia.

Renvoi, 2019, *Jembatan Informasi Rekan*, GRIPS, PT.Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta.

Said, Umar, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, setra press Malang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumarjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumaryono,E, 1995, *Etika Profesi-Norma-norma bagi penegak hukum*, Kanisius.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, Agustus 1995, *Etika Profesi Notaris-Dalam Penegakan hukum Pidana*.

Untung, H Budi, 2005, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

B. Jurnal

Muslim, Fithriadi, “Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Pusat Kajian Anti Pencucian uang Indonesia Research Center for AML-CFT (IRCA)*, Depok, 2013

C. Tesis

Kristiyana, Risa, “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, 2017.

Permatasari, Mudiana, “Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Unversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Siswoyo Budi Priono, “ Peran Advokat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisi Transaksi Keuangan Nomor: Per-14/1.02/PPATK/11/14 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Permen Agraria & tata ruang/ kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

E. Internet/Web

/PPATK-ajak-profesi-ini-melaporkan-transaksi-mencurigakan/
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

<http://m.detik.com/news/berita/cegah-tpu-advokat-notaris-hingga-akuntan-diminta-lapor-ke-ppatk>, diakses pada tanggal 20 July 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt530073486c2fc/beberapa-pasal-dalam-satu-peraturan-saling-bertentangan-mana-yang-berlaku>, diakses pada tanggal 08 April 2019.

<https://surabayapost.id/terlibat-kasus-penjualan-aset-pemkot-notaris-nataliaterancam-20-tahun-penjara/>

Jdih.ppatk.go.id/, Pusat Pelaporan Dan Analisi Transaski Keuangan, September 2017, Potensi Risiko Tindak Pidana pencurian Uang Pada Profesi berdasarkan hasil National Risk Assesment, diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

Notaris”OpenbareAmbtenaren”Syafran Sofyan-Jimly-School Of Law and Government,<https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan>, diakses pada tanggal 08 April 2019.

www.ppatk.go.id/ Rencana strategis tahun 2015- 2019, diakses tanggal 11 Juli 2018.

www.ppatk.go.id/pelaporan/read/60/panduan-registrasi-dan-instalasi-grips.html, diakses pada tanggal 11 juli 2018.

www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html diaskes pada tanggal 14 febuari 2019.

<http://m.bisnis.com/>, Pencucian Uang:PPATK gencarkan Sosialisasi Kewajiban Pelaporan, diakses pada tanggal 2 September 2018.

www.ppatk.go.id/home/menu/2_profile.html, diakses pada tanggal 14 februari 2019.